

**LATAR BELAKANG KERJASAMA INDONESIA-JEPANG  
MENGELOLA 6 PULAU KECIL TERLUAR INDONESIA DALAM  
SKEMA *INDONESIA-JAPAN MARITIME FORUM (IJMF)***

**ABSTRAK**

Seiring dengan pentingnya keberadaan pulau-pulau terluar, Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk bekerja sama dalam skema Indonesia-Jepang Maritim Forum (IJMF). Dalam kerjasama ini, Jepang memberikan hibah uang untuk membangun dan memberdayakan potensi pulau-pulau terluar Indonesia yang terpilih, yaitu pulau Sabang, Natuna, Morotai, Biak, Moa dan Saumlaki. Melibatkan dana asing dalam mengelola wilayah Indonesia sebenarnya adalah hal yang kontroversi, apalagi wilayah tersebut adalah pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara-negara asing. Dana asing yang mengalir ke suatu negara meski dalam bentuk hibah tentu akan berdampak pada negara penerima. Disini faktanya Indonesia telah menerima kerjasama ini.

Berdasarkan fakta penerimaan kerja sama dalam bentuk hibah uang dan fasilitas perikanan guna memaksimalkan pengelolaan di 6 pulau terluar Indonesia, penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan apakah latar belakang Pemerintah Indonesia menerima kerjasama ini. Mengingat bahwa dana yang disalurkan oleh Jepang sebagai negara donor akan mengalir ke wilayah perbatasan Indonesia, bukankah perbatasan merupakan wilayah sensitif karena mereka rentan terhadap pengaruh asing?, dan bukankah pulau terluar memiliki peran penting bagi kedaulatan Indonesia?, maka adalah logika terbalik jika Indonesia dengan serta merta melibatkan Negara Asing dalam rangka mengembangkan potensi 6 pulau terluarnya. Terlebih lagi, telah diketahui bahwa bantuan asing tidak hanya sebatas pemberian dana dari negara donor kepada negara penerima. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan ilmu politik tepatnya dengan teori pengambilan keputusan oleh Richard Snyder.

***Kata kunci:*** *Bantuan Luar Negeri, Pengambilan Keputusan, Ekonomi Politik dan Pertahanan Wilayah Perbatasan.*

# **INDONESIA-JAPAN COOPERATION BACKGROUND IN MANAGING 6 OUTER ISLANDS OF INDONESIA IN THE SCHEME OF INDONESIA- JAPAN MARITIME MARITIME FORUM (IJMF)**

## **ABSTRACT**

Along with the importance of the existence of the outer islands, the Governments of Indonesia and Japan agreed to cooperate in the scheme of Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF). In this collaboration, Japan provided grants of money to build and empower the potentials of the selected Indonesian outer islands, namely Sabang, Natuna, Morotai, Biak, Moa and Saumlaki islands. Involving foreign funds in managing the territory of Indonesia actually is a matter of controversy, moreover the area are the outer islands which are directly adjacent to foreign countries. Foreign funds flowing into a country even though in the form of grants certainly will have implications for the recipient country. Here is the fact that Indonesia has accepted this collaboration.

Based on the fact of the acceptance of cooperation in the form of financial grants by the government to maximize infrastructure management in 6 of Indonesia's outer islands, this study sought to reveal whether the background of the Indonesian government accepted this collaboration. Considering that the funds disbursed by Japan as a donor country will flow into Indonesia's border areas, aren't borders a sensitive area because they are vulnerable to foreign influences? and doesn't the outer island have an important role for Indonesian sovereignty? Then it is a reverse logic if Indonesia immediately involves foreigners in order to develop the potential of the 6 outer islands. Considering that foreign aid is not just giving funds by the donor country to the recipient country. This research is qualitative with a political science approach precisely with the decision making theory by Richard Snyder.

***Keywords:*** *Foreign Aid, Decision Making, Political Economy and Defense of the Border Region*